



Penguatan Struktur Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan

Ernah¹, Fauzi Jihadul Haq², Serli Febrianti³, Rifka Haula Anggraeni⁴, Zweta Br.Simorangkir⁵, Pruisya Tabinacahya Giasani⁶, Ikrar Nusa Bhakti⁷

Universitas Padjadjaran^{1,2,3,4,5,6,7}

E-mail : ernah@unpad.ac.id¹, fauzijh09@gmail.com², spebrianti6@gmail.com³,
rifkahaualaanggraeni@gmail.com⁴, zwetasimorangkir13@gmail.com⁵, pruisya@gmail.com⁶,
ikrarnusabhakti12@gmail.com⁷

Abstrak

Desa Banyuresmi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial akibat kesenjangan antara kebijakan penyaluran bantuan sosial dan implementasinya di tingkat desa serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam pelayanan kesejahteraan sosial melalui penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) berbasis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode observasi dan pendekatan partisipatif melalui identifikasi permasalahan, rapat wilayah, diskusi dengan pemangku kepentingan, sosialisasi, dan pelatihan kepada aparatur desa serta masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme Puskesos SLRT sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial. Kegiatan juga menghasilkan Surat Keputusan Pengurus Puskesos Desa Banyuresmi yang terdiri atas fasilitator, front office, dan back office sebagai dasar penguatan kelembagaan. Selain itu, pelatihan pengemasan, pemasaran, dan digitalisasi produk UMKM meningkatkan wawasan masyarakat dalam pengembangan usaha berbasis teknologi digital. Program ini memperkuat kelembagaan Puskesos sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi desa.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan, Ekonomi Lokal, Kemiskinan

Abstract

Banyuresmi Village possesses abundant natural resources as a key asset for rural development; however, it continues to face social welfare challenges due to the gap between national social assistance policies and their implementation at the village level, as well as limited public understanding of social welfare services. This community service activity aimed to strengthen village institutional capacity in delivering social welfare services through the establishment of the Social Welfare Center (Pusat Kesejahteraan Sosial/Puskesos) based on the Integrated Service and Referral System (SLRT) and to enhance community economic empowerment. The program employed observation and a participatory approach through problem identification, stakeholder meetings, discussions, socialization activities, and training for village officials and community members. The results demonstrated improved knowledge among village officials and residents regarding the roles and functions of the Puskesos-SLRT. The program also resulted in the issuance of an official decree establishing the Puskesos management team, consisting of facilitators, front office, and back office personnel, thereby strengthening the institutional framework for social welfare services. In addition, training on product packaging, marketing, and digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) enhanced participants' capacity to develop and market local products. Overall, the program contributed to strengthening village social welfare institutions while promoting community empowerment and sustainable rural development.

Keywords: Social Welfare, Empowerment, Local Economy, Poverty

Copyright (c) 2026 Ernah, Fauzi Jihadul Haq, Serli Febrianti, Rifka Haula Anggraeni, Zweta Br.Simorangkir, Pruisya Tabinacahya Giasani, Ikrar Nusa Bhakti

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Email : ernah@unpad.ac.id

DOI : 10.31004/abdidas.v7i4.1380

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Pendekatan pengentasan kemiskinan saat ini tidak lagi berfokus pada bantuan yang bersifat karitatif, tetapi diarahkan pada penguatan sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan ((Basri et al., 2026), (Nazrin et al., 2022), (Fadhilah, 2025)(Rohyadi et al., 2024).

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesejahteraan sosial adalah pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagai pusat layanan informasi, pendataan, pengaduan, serta rujukan berbagai program perlindungan sosial di tingkat desa. Keberadaan Puskesmas diharapkan mampu memperkuat integrasi pelayanan sosial sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial melalui koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pelayanan sosial yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan akses masyarakat miskin terhadap program perlindungan sosial serta memperbaiki kualitas tata kelola pelayanan publik ((Fentiani et al., 2025; Nazrin et al., 2022))(Ritonga et al., 2023).

Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang masih menghadapi permasalahan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data pemerintah desa, sekitar 200 jiwa dari total 2.455 penduduk termasuk dalam kelompok desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem. Meskipun berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilaksanakan, proses penyalurannya masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara data usulan pemerintah desa dengan data yang digunakan dalam proses penetapan penerima bantuan, sehingga masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memperoleh bantuan, sementara rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik justru menerima bantuan (Sari et al, 2023), (Rahma et al., 2025), (Irvan & Syahri, 2026).

Permasalahan tersebut diperparah oleh belum optimalnya fungsi Puskesmas di Desa Banyuresmi. Secara kelembagaan, Puskesmas masih dirangkap oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) akibat keterbatasan sumber daya manusia, sehingga fungsi pelayanan informasi, pengaduan, pendataan, dan rujukan kesejahteraan sosial belum berjalan secara maksimal. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memahami keberadaan maupun fungsi Puskesmas sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa. Padahal, efektivitas kelembagaan lokal merupakan salah satu faktor

penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial (Habibullah, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Padjadjaran melaksanakan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kelembagaan Puskesmas melalui sosialisasi fungsi, struktur, dan mekanisme pelayanan kepada pemerintah desa dan Masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. (Putri, 2026).

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada periode Januari tahun 2026 menggunakan pendekatan metode observasi lapangan dan metode partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap tahapan program. Sasaran kegiatan meliputi Pemerintah Desa Banyuresmi, pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), aparat RT/RW, pelaku UMKM, serta masyarakat di Dusun Lampegan dan Dusun Cigintung. Metode pelaksanaan terdiri atas dua tahapan utama, yaitu observasi dan pendekatan partisipatif (Ernah, et al, 2026)

Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi kondisi eksisting,

kebutuhan masyarakat, serta permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Observasi dilaksanakan secara langsung di Desa Banyuresmi melalui pengamatan terhadap aktivitas pelayanan Puskesmas, kondisi administrasi, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial, serta koordinasi antara pemerintah desa, pengurus Puskesmas, dan aparat kewilayahan. Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai kapasitas kelembagaan Puskesmas dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi, pendataan, pengaduan, dan rujukan layanan sosial.

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, observasi dilakukan melalui koordinasi dengan ketua RT dan RW di Dusun Lampegan dan Dusun Cigintung sebagai informan kunci yang memahami karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini {Citation} digunakan untuk memetakan potensi UMKM, jenis usaha yang berkembang, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, seperti pengemasan produk, pemasaran, dan pemanfaatan media digital. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan materi pendampingan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama proses observasi, tim pengabdian tidak melakukan intervensi terhadap aktivitas masyarakat sehingga data yang diperoleh menggambarkan kondisi nyata di lapangan ((Ernah et al., 2024), (Ernah et al., 2022), Kurniawati et al, 2021).

Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Pendekatan ini melibatkan pemerintah desa, pengelola Puskesmas yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra), aparat RT/RW, pelaku UMKM, serta masyarakat sebagai mitra utama kegiatan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (ownership) terhadap program sehingga keberlanjutan kegiatan setelah pelaksanaan KKN dapat lebih terjamin.

Implementasi pendekatan partisipatif diwujudkan melalui kegiatan diskusi, koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan. Pada aspek kesejahteraan sosial, kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme kerja Puskesmas sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini akan dijelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan dan Program KKN

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan penguatan kapasitas

kelembagaan Puskesmas, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Tahapan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial di Desa Banyuresmi sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan, pendataan, pengaduan, dan rujukan sosial secara lebih efektif.

Tahap Identifikasi Kebutuhan dan Analisis Permasalahan

Tahap pertama dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi partisipatif dengan Pemerintah Desa Banyuresmi, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra), kepala wilayah, RT/RW, serta masyarakat di Dusun Lampegan dan Dusun Cigintung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pelayanan kesejahteraan sosial sekaligus memetakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Puskesmas.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial di Desa Banyuresmi belum berjalan secara optimal. Puskesmas belum berfungsi sebagai lembaga pelayanan yang mandiri karena pengelolaannya masih dirangkap oleh Kasi Kesra. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pelayanan informasi, penerimaan pengaduan, pendataan masyarakat miskin, serta koordinasi rujukan layanan sosial belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, sebagian besar masyarakat maupun aparat kewilayahan belum memahami keberadaan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

Permasalahan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait proses penyampaian informasi dan pengaduan mengenai bantuan sosial. Berdasarkan hasil diskusi dengan aparatur desa, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data usulan penerima bantuan dengan penerima bantuan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Tahap identifikasi kebutuhan menjadi dasar penyusunan program pengabdian. Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah desa dan masyarakat tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga terlibat dalam merumuskan kebutuhan prioritas sehingga program yang disusun lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Tahap Penguatan Kapasitas Puskesmas

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Kegiatan ini dilaksanakan setelah Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan melibatkan pemerintah desa, kepala wilayah, RT, RW, dan unsur masyarakat. Pemilihan waktu pelaksanaan setelah Musdesus bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pelayanan sosial desa dapat mengikuti kegiatan secara bersamaan.

Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan fungsi Puskesmas sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial terpadu, struktur organisasi, mekanisme pelayanan, serta peran masing-masing unsur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial. Penyampaian materi

menggunakan bahasa Sunda agar komunikasi lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan interaksi selama kegiatan, yang terlihat dari diskusi mengenai mekanisme pelayanan, alur pengaduan masyarakat, dan koordinasi antara RT/RW dengan Puskesmas.

Pelaksanaan sosialisasi memberikan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai fungsi Puskesmas. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta masih menganggap pelayanan kesejahteraan sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kasi Kesra. Setelah sosialisasi, peserta memahami bahwa Puskesmas merupakan kelembagaan tersendiri yang memiliki fungsi pelayanan informasi, verifikasi, pengaduan, pendataan, serta rujukan terhadap berbagai program kesejahteraan sosial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan langkah awal dalam membangun tata kelola pelayanan sosial yang lebih terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan lokal mampu memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Tahap Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Puskesmas

Hasil penting dari program pengabdian ini adalah adanya penguatan tata kelola kelembagaan Puskesmas melalui penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas yang lebih jelas. Sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi, Pemerintah Desa

Banyuresmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan struktur pengelola Puskesmas.

Melalui SK tersebut ditetapkan pembagian fungsi menjadi tiga bagian utama, yaitu fasilitator, front office, dan back office. Fasilitator bertugas melakukan pendampingan dan koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial, front office berperan menerima pelayanan dan pengaduan masyarakat, sedangkan back office bertanggung jawab terhadap administrasi, pendataan, dan pengelolaan dokumen pelayanan sosial. Pembagian fungsi ini menjadi perubahan penting dibandingkan kondisi sebelumnya, di mana seluruh pelayanan masih terpusat pada Kasi Kesra.

Penerbitan SK tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan Puskesmas. Selain memberikan kepastian mengenai struktur organisasi, pembagian fungsi juga memperjelas alur pelayanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan kelembagaan seperti ini merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kapasitas organisasi publik karena mampu meningkatkan akuntabilitas, koordinasi, dan keberlanjutan pelayanan (Brinkerhoff & Morgan, 2010).

Selain perubahan kelembagaan, kegiatan ini juga menghasilkan peningkatan pemahaman aparatur desa, kepala wilayah, RT, dan RW mengenai fungsi Puskesmas sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial. Aparatur desa menjadi lebih memahami mekanisme pelayanan dan mampu mengarahkan masyarakat yang membutuhkan

layanan sosial kepada Puskesmas sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Puskesmas tidak lagi dipandang sebagai tugas tambahan Kasi Kesra, melainkan sebagai kelembagaan desa yang memiliki struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong penguatan kelembagaan Puskesmas di Desa Banyuresmi. Keterlibatan aktif pemerintah desa, aparatur kewilayahan, dan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga tindak lanjut menghasilkan perubahan kelembagaan yang nyata berupa terbentuknya struktur organisasi Puskesmas, pembagian fungsi pelayanan, serta meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial. Hasil ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa merupakan strategi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Program KKN ini telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan KKN di Desa Banyuresmi menunjukkan bahwa penguatan pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan sinergi antara kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat. Penguatan fungsi Puskesmas mendukung perbaikan tata kelola pelayanan bantuan sosial melalui sistem yang lebih terstruktur. Secara keseluruhan,

program KKN berperan sebagai fasilitator dalam mendukung penguatan pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi desa. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pengesahan kepengurusan, pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, serta penguatan fungsi layanan dan pengaduan agar penyaluran bantuan sosial lebih efektif dan transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam program KKN ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, D.W. and Morgan, P.J. (2010). Capacity and capacity development: Coping with complexity. *Public Admin. Dev.*, 30: 2-10. <https://doi.org/10.1002/pad.559>
- Basri, S. N. I., Putri, R. A., & Febrianto, R. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *JURNAL RUANG SOSIALIA (Ruang Ilmiah: Sosial dan Keagamaan)*, 2(01), 527–539.
- Ernah, E., Rahayuwati, L., Yani, D. I., & Djuwendah, E. (2024). Kegiatan Tanam Pohon Sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Asri Desa Sehat Plus. *Jurnal Abdidas*, 5(1), 33–38. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i1.895>
- Ernah, E., Subroto, E., & Indiarto, R. (2022). Pengenalan Digital Marketing pada UKM Aneka Cemilan Hikmah Bandung. *Jurnal Abdidas*, 3(1), 206–211. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.558>
- Fadhilah, A. D. (2025). Gerbang Emas: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan Dan Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 9(2), 93–97. <https://doi.org/10.37145/2w855g58>
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 7(1).<https://doi.org/10.23969/humanitas.v7i1.21718>
- Habibullah, H. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif. *Socio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 295–306.
- Irvan, D. M., & Syahri, N. I. (2026). Peran Layanan Sosial Terintegrasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat di Kecamatan Bintan Utara. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 56–62. <https://doi.org/10.60126/maras.v4i1.1462>
- Nazrin, N., Maudy, A., & Hermalinda, S. (2022). PELAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *JURNAL ECONETICA: Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 4(2), 41–53. <https://doi.org/10.69503/econetica.v4i2.311>
- Putri, A. M. (2026). Kewirausahaan Sosial Dan Modal Sosial: Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Sosiologis. *Socio Religia*, 7(1). <https://doi.org/10.24042/yjtzg620>
- Rahma, A., Lestari, D. A., Nasiroh, R. A., & Afif, A. (2025). Menggali Akar Permasalahan: Kajian Mendalam Terhadap Data Kemiskinan Dan Mekanisme Bantuan Sosial. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 192–198. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.93>
- Ritonga, F. U., Suriadi, A., & Isworo, H. (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2), 87–102. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.13491>

- 537 *Penguatan Struktur Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan* – Ernah, Fauzi Jihadul Haq, Serli Febrianti, Rifka Haula Anggraeni, Zweta Br.Simorangkir, Pruisya Tabinacahya Giasani, Ikrar Nusa Bhakti
DOI: 10.31004/abdidas.v7i4.1380

Kurniawati, E., Idris, I., Handayati, P., & Osman, S. (2021). Digital transformation of MSMEs in Indonesia during the pandemic. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 9(2), 316–331.
[https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2\(21\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(21))

Rohyadi, R. F., Kusumawati, A., Kamila, S., & Pasya, M. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 167–173.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.967>

Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 8(1), 37–50